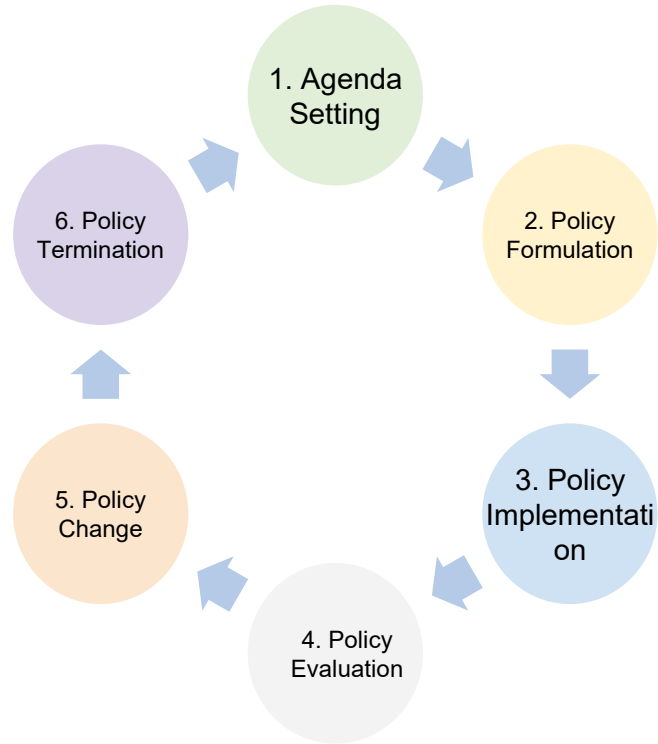


10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode

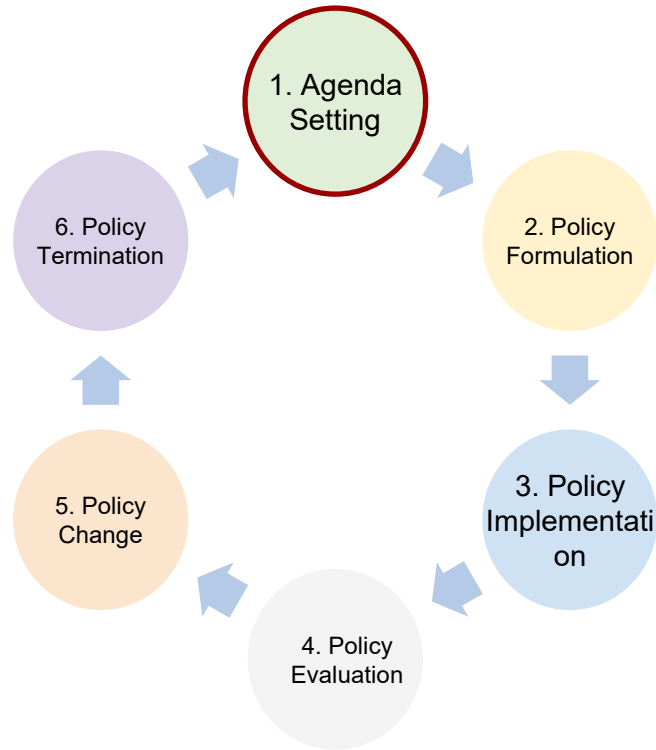
Bagian I: Pengantar

Siklus Kebijakan Kesehatan



Memahami tujuan kebijakan besar seperti UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011) dengan melihat sejarah masa lalu.

Siklus Kebijakan Kesehatan



Bagaimana sejarah agenda setting pada masa sebelum UU SJSN dirumuskan pada tahun 2004?

Apakah ada tujuan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan secara keseluruhan?

Apa ideologi/value yang melandasinya?

Pengertian penelitian sejarah:

"berusaha untuk secara sistematis menangkap kembali nuansa kompleks, orang-orang, makna, peristiwa, dan bahkan gagasan masa lalu yang telah mempengaruhi dan membentuk masa kini". (Berg & Lure, 2012, hal.305)

.

Di awal Reformasi (tahun 2000an)

Ada Krisis Ekonomi yang berimpact pada Politik. Pergantian dari Orde Baru ke Masa Reformasi. Ada eforia untuk mengurangi:

- a. otoritas pemerintah pusat dengan kebijakan desentralisasi kesehatan, dan
- b. memecah otoritas Departemen Kesehatan

Ditandai dengan rangkaian UU dalam desentralisasi politik, dan UU Praktik Kedokteran 2004

+ Kebijakan untuk memperhatikan masyarakat miskin yang terkena imbas krisis moneter di tahun 1990an akhir.

Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial

Pertanyaan dalam kuliah ini:

1. Apakah perubahan sangat besar dalam pendanaan kesehatan di Indonesia dengan adanya BPJS merupakan sebuah Reformasi Sistem Kesehatan?
2. Apakah dana BPJS menjadi sumber dana yang mudah dikorupsi?
3. Apakah ada perubahan nilai?

Pertanyaan dalam kuliah ini:

1. Apakah perubahan sangat besar dalam pendanaan kesehatan di Indonesia dengan adanya BPJS merupakan sebuah Reformasi Sistem Kesehatan?

Definisi yang dikenal luas:
Health Sector Reform

*Health sector reform is defined as sustained, purposeful change to improve the efficiency, equity and effectiveness of the **health sector**.*

...

Catatan:

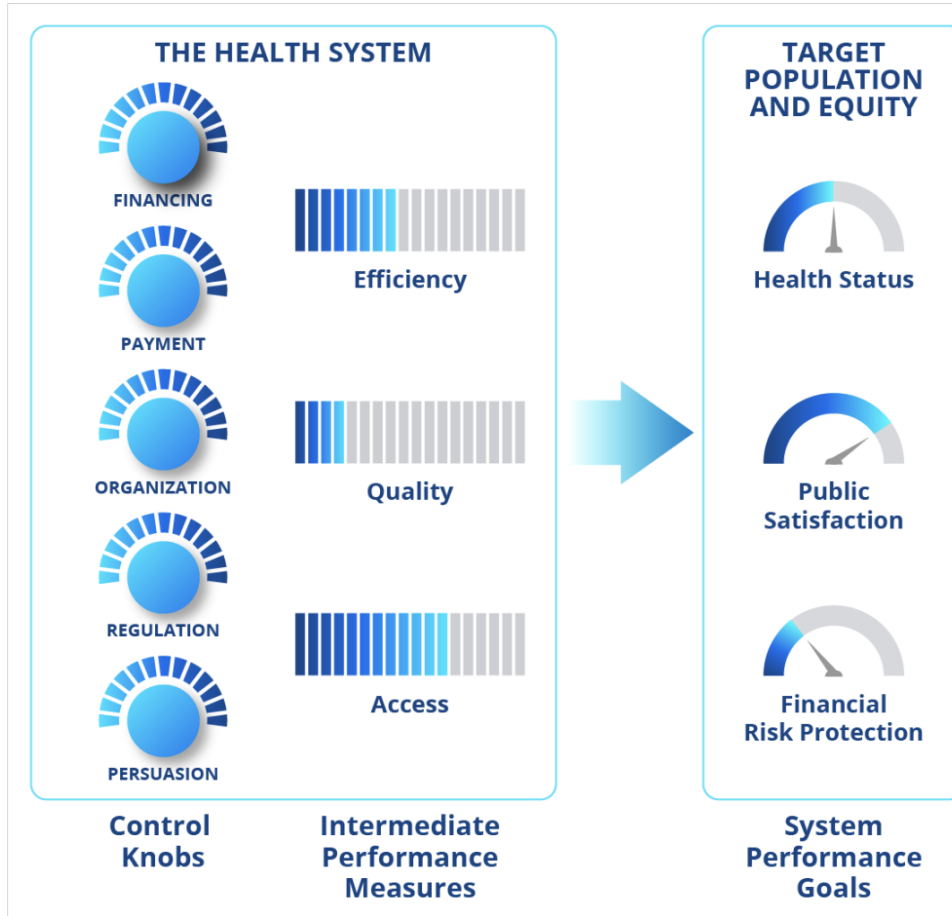
Tidak semua
perubahan kebijakan
di kesehatan
merupakan reformasi

Figure 3-1: Health system control knobs, intermediate and final performance measures

Metafora:

The five control knobs for health-sector reform

(Roberts et al, 2004, Harvard University)



Source: adapted from GHRR, p. 27.

Apakah ada:

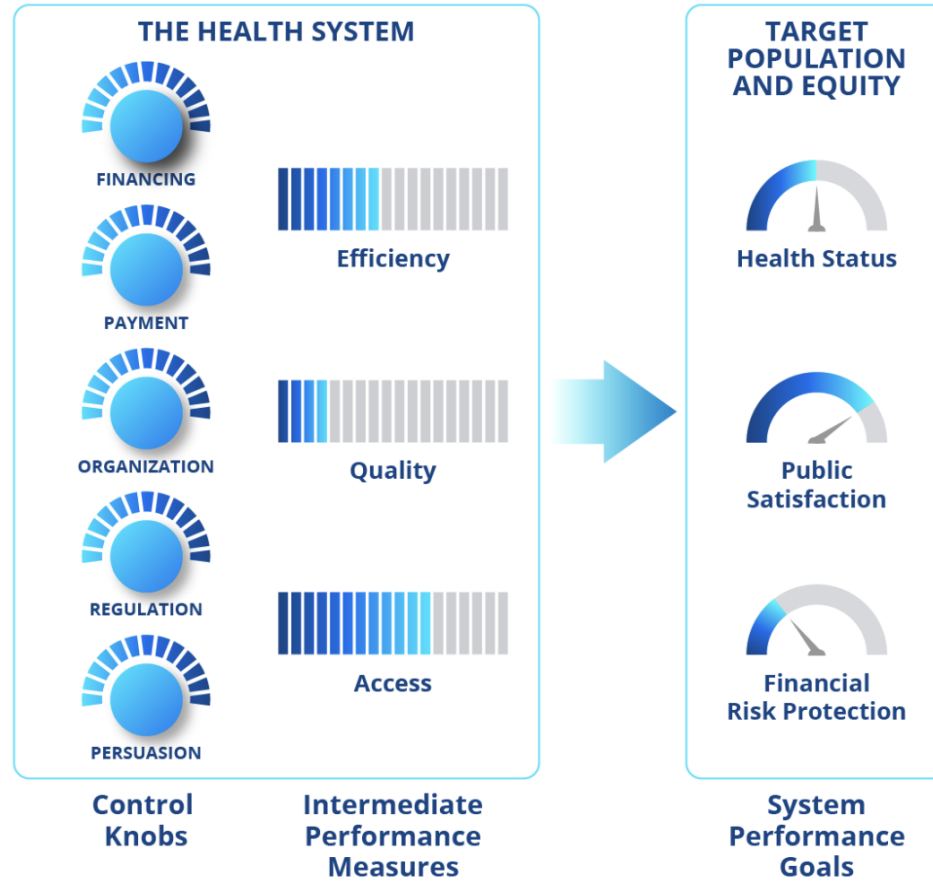
R besar:

semua tombol diatur
bersama

atau

r kecil

tidak semua tombol
diatur bersama



Tujuan Reformasi Kesehatan dalam mengatasi masalah bangsa



- Akses dan Cakupan
- Quality dan safety
- membangkitkan sumber-sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan.
- Kepastian hukum



- **Status Kesehatan dan Pemerataan**
- **Responsiveness pelayanan**
- **Proteksi Katastropik**
- **Peningkatan efisiensi**

Rangkuman dari berbagai sumber

Pertanyaan dalam kuliah ini:

2. Apakah dana BPJS menjadi sumber korupsi?

Fraud Layanan JKN Capai Rp 6,8 T: Tagihan Fiktif-Dokter Bikin Pasien Bolak-balik RS

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth

Kamis, 11 Des 2025 18:01 WIB



BPJS Kesehatan melaporkan temuan pencegahan dan penindakan fraud. (Foto: Nafilah Sri Sagita/detikHealth)

Ada beberapa fenomena yang perlu dilihat, antara lain:

- **Fraud di dalam BPJS**
- **Covidisasi dalam masa Covid18**

Belum dapat dikendalikan dengan baik karena struktur ekosistem pencegahan korupsi belum baik.

Pertanyaan dalam kuliah ini:

3. Apakah ada perubahan nilai?

Langkah-langkah melakukan reformasi kesehatan di sebuah negara

Harvard University,
2023

Figure Intro-1: Overview of Eight Practical Steps in the Health Reform Process



Apakah dalam proses panjang ini terjadi perubahan nilai dalam JKN?

Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial

- JPS-Bidang Kesehatan
- Jamkesmas,
- Askeskin

Ideologi: Menolong yang miskin dan terpinggirkan.

Keadilan Sosial bagi seluruh bangsa Indonesia

**Berkembang
menjadi
BPJS**

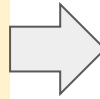
**Apakah terjadi
pergeseran Nilai?**

Contoh pergeseran Nilai

- JPS-Bidang Kesehatan
- Jamkesmas,
- Askeskin

Ideologi: Menolong yang miskin dan terpinggirkan.

Keadilan Sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

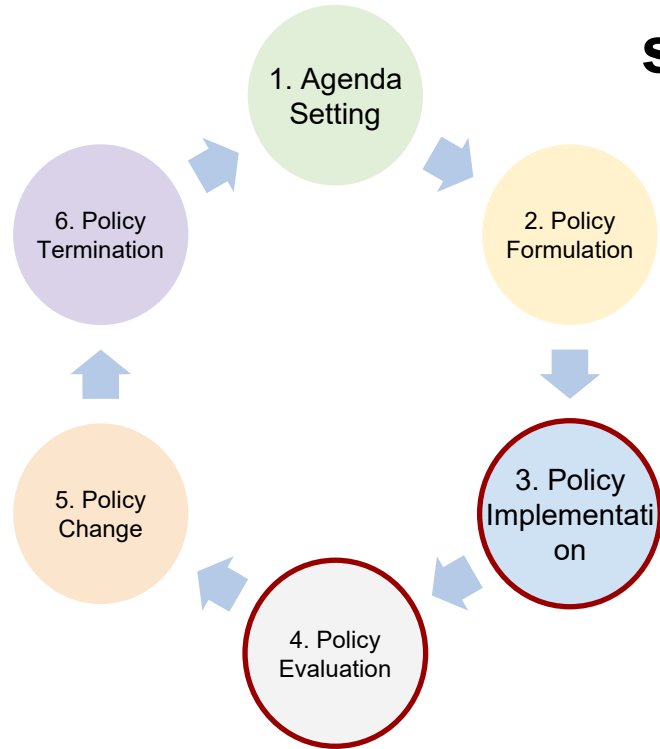


**Berkembang
menjadi
BPJS**

- Meningkatkan ekonomi
- Menjadi UHC dengan pencapaian 95%
-

Siklus Kebijakan Kesehatan

Saatnya JKN dievaluasi dengan seksama.



Bevaola Kusumasari, FISIPOL UGM

